



Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk: Perspektif Aktor dan Relasi Kekuasaan

Hanifah Nilau Putri¹⁾, Nora Eka Putri²⁾, Lince Magriasti³⁾, Yulhendri⁴⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding author, email: hanifanilauputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi pupuk dengan menekankan pada dinamika aktor dan relasi kekuasaan dalam proses penyaluran dan pengawasannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam kebijakan subsidi pupuk tidak semata-mata disebabkan oleh kendala teknis, melainkan oleh ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor dalam proses implementasi. Aktor distribusi seperti distributor dan pengecer, serta sebagian birokrasi lokal, memiliki posisi dominan dalam mengendalikan akses pupuk melalui penguasaan jaringan distribusi dan informasi. Dominasi ini memungkinkan terjadinya praktik pengalihan distribusi, penentuan penerima secara selektif, serta pemanfaatan celah pengawasan untuk kepentingan ekonomi tertentu. Di sisi lain, petani kecil sebagai kelompok sasaran berada pada posisi subordinat, dengan keterbatasan akses terhadap informasi, jaringan, dan mekanisme kontrol kebijakan. Relasi yang terbentuk bersifat asimetris, di mana aktor yang memiliki sumber daya dan kekuasaan lebih besar mampu memengaruhi hasil implementasi, sementara petani cenderung menjadi pihak yang terdampak tanpa memiliki daya tawar yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam praktiknya merupakan arena interaksi kepentingan, di mana hasil kebijakan sangat ditentukan oleh distribusi kekuasaan antar aktor. Dengan demikian, efektivitas kebijakan subsidi pupuk tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada bagaimana negara mampu mengendalikan relasi kekuasaan dalam implementasi. Tanpa penguatan kapasitas pengawasan dan penyeimbangan posisi antar aktor, kebijakan akan terus mengalami distorsi dan gagal mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan petani.

Kata kunci: Subsidi Pupuk, Aktor Kebijakan, Kebijakan Publik

Abstract

This study aims to analyze the implementation of fertilizer subsidy policy by emphasizing the dynamics of actors and power relations in its distribution and supervision processes. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of various relevant secondary data sources. The findings indicate that the problems in the fertilizer subsidy policy are not merely caused by technical constraints, but rather by unequal power relations among actors in the implementation process. Distribution actors such as distributors and retailers, along with certain local bureaucratic actors, hold dominant positions in controlling access to fertilizers through their control over distribution networks and information. This dominance enables practices such as diversion of distribution, selective determination of beneficiaries, and the exploitation of weak oversight mechanisms for particular economic interests. On the other hand, smallholder farmers as the main target group are positioned subordinately, with limited access to information, networks, and policy control mechanisms. The resulting relationship is asymmetrical, where actors with greater resources and power are able to influence policy outcomes, while farmers tend to become passive recipients without sufficient bargaining power. This condition demonstrates that public policy in practice operates as an arena of competing interests, where outcomes are largely determined by the distribution of power among actors. Therefore, the effectiveness of fertilizer subsidy policy depends not

only on policy design, but also on the state's ability to manage power relations in the implementation process. Without strengthening oversight capacity and balancing the positions among actors, the policy will continue to experience distortions and fail to achieve its goals of equity and farmers' welfare.

Keywords: *Fertilizer Subsidy, Policy Actors, Public Policy*

PENDAHULUAN

Program subsidi pupuk di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 1969 sebagai upaya pemerintah dalam mendukung produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional (Irmalasari & Baharuddin, 2024). Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini mengalami berbagai perubahan, terutama dalam mekanisme penyalurannya, namun tetap mempertahankan bentuk subsidi dalam bentuk barang dengan harga yang lebih rendah bagi petani. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah yang cukup lama bertahan karena dianggap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor pertanian. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keberadaan subsidi pupuk berkontribusi dalam menjaga produktivitas sektor pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada sektor ini (Tarissa, 2026).

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi subsidi pupuk mencapai Rp26,7 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp44,2 triliun pada tahun 2025. Meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, implementasi kebijakan subsidi pupuk belum sepenuhnya berjalan baik di lapangan. Besarnya anggaran yang dikeluarkan menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap sektor pertanian, namun pada saat yang sama juga menuntut adanya pengelolaan yang lebih baik agar anggaran tersebut tidak terbuang secara tidak efektif. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahman (2021) yang menyatakan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan jika tidak didukung sistem distribusi yang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya alokasi anggaran dengan kapasitas implementasi kebijakan di lapangan.

Pelaksanaan program yang telah berlangsung lebih dari setengah abad ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan petani dan jenis pupuk yang tersedia, serta ketidaktepatan dalam distribusi. Selain itu, permasalahan sosial-ekonomi dan lemahnya sistem distribusi juga menjadi faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Di beberapa wilayah, petani masih kesulitan mendapatkan pupuk pada waktu yang tepat, yang pada akhirnya berdampak pada hasil produksi mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ekawati et al. (2021) yang menyebutkan bahwa distribusi pupuk yang tidak tepat waktu dapat menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik.

Dalam perspektif kebijakan publik, permasalahan ini tidak terlepas dari peran aktor kebijakan yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta dan kelompok tani. Ketidaksinergian antar aktor ini menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan subsidi pupuk di lapangan. Perbedaan kepentingan, keterbatasan koordinasi, serta lemahnya pengawasan memperlihatkan bahwa masalah yang terjadi bukan hanya pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh para aktor yang terlibat. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian Setiyana & Alwi (2024) yang menyoroti pentingnya kolaborasi antar aktor dalam keberhasilan kebijakan publik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas subsidi pupuk dari aspek distribusi serta dampaknya terhadap produktivitas pertanian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada persoalan teknis dan ekonomi. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa permasalahan yang sama terus berulang meskipun alokasi anggaran terus meningkat dan berbagai perbaikan kebijakan telah dilakukan. Dalam konteks ini, aspek relasi kekuasaan, kepentingan, serta interaksi antar aktor kebijakannya maupun kelompok tani masih relatif kurang mendapat perhatian. Padahal, dinamika aktor inilah yang berpotensi menentukan bagaimana kebijakan dijalankan, diawasi, dan bahkan disimpangkan di tingkat

implementasi. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan perspektif aktor dan kekuasaan sebagai fokus analisis untuk memahami akar permasalahan implementasi subsidi pupuk, sehingga tidak hanya melihat “apa yang salah” dalam kebijakan, tetapi juga “siapa dan bagaimana” kebijakan tersebut dipengaruhi dalam praktiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* atau studi dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan publik, khususnya dinamika implementasi subsidi pupuk dan relasi antar aktor yang terlibat. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, serta laporan resmi pemerintah yang relevan dengan kebijakan subsidi pupuk. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) publikasi dalam rentang tahun 2020–2026, (2) memiliki relevansi langsung dengan topik subsidi pupuk, implementasi kebijakan publik, atau peran aktor kebijakan, serta (3) diterbitkan pada jurnal terindeks (SINTA atau Scopus) atau penerbit akademik yang kredibel. Dari proses penelusuran literatur melalui database seperti Google Scholar dan portal jurnal lainnya, diperoleh sejumlah artikel yang kemudian diseleksi secara purposive berdasarkan kesesuaian substansi, sehingga menghasilkan ±20–30 literatur utama sebagai bahan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengekstraksi informasi penting dari setiap literatur, khususnya yang berkaitan dengan peran aktor, mekanisme distribusi, serta permasalahan implementasi kebijakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengungkap relasi kekuasaan dan dominasi aktor, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola berulang, kontradiksi, serta kecenderungan narasi dalam berbagai studi yang dianalisis. Melalui proses ini, relasi kekuasaan tidak dilihat secara langsung dari data lapangan, tetapi direkonstruksi dari kecenderungan temuan empiris yang dilaporkan dalam berbagai penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis kebijakan publik, aktor kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. William R. Dahl (1972) mendefinisikan aktor sebagai pihak pengambil keputusan, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan. Aktor ini tidak hanya terlibat dalam tahap perumusan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Nugroho (2020) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen aktor yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, aktor tidak bersifat netral, melainkan membawa kepentingan yang memengaruhi arah kebijakan.

Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Dalam konteks subsidi pupuk, isi kebijakan seperti penetapan harga subsidi dan sistem RDKK tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Konflik kepentingan antar aktor dalam konteks ini tidak hanya menghambat implementasi, tetapi juga menciptakan relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang diuntungkan dalam distribusi pupuk (Cahyono, 2026).

Sementara itu, Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam praktiknya, pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar. Purwanto (2026) menegaskan bahwa relasi kekuasaan antar aktor sangat memengaruhi arah dan hasil kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan.

Tujuan kebijakan subsidi pupuk adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, dalam implementasinya, ketidakmerataan distribusi pupuk menunjukkan adanya masalah pada *context of implementation* sebagaimana dijelaskan Grindle.

Distribusi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu (Ragimun & Setiawan, 2020) mengindikasikan bahwa aktor distribusi, seperti distributor resmi dan pengecer, memiliki kontrol lebih besar terhadap alur pupuk. Dalam konteks ini, mereka memiliki remunerative power (kekuasaan berbasis keuntungan ekonomi), yang memungkinkan mereka menentukan kepada siapa pupuk didistribusikan.

Ketidakmerataan distribusi pupuk tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi harus dilihat dalam kerangka context of implementation sebagaimana dikemukakan oleh Grindle. Dalam konteks ini, distribusi pupuk dipengaruhi oleh konfigurasi aktor yang terlibat, khususnya distributor resmi dan pengecer yang memiliki kontrol terhadap jaringan distribusi. Konsentrasi distribusi di wilayah tertentu (Ragimun & Setiawan, 2020) menunjukkan bahwa aktor-aktor tersebut memiliki posisi strategis dalam menentukan alokasi pupuk, sehingga distribusi tidak berlangsung secara netral. Dalam perspektif Dahl (1972), kondisi ini mencerminkan adanya aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di tingkat implementasi. Sementara itu, dalam kerangka Dye, kondisi ini menunjukkan bahwa apa yang “dilakukan atau tidak dilakukan” oleh pemerintah dalam mengatur distribusi secara merata pada akhirnya dipengaruhi oleh keterbatasan kontrol terhadap aktor di lapangan. Dengan demikian, ketimpangan distribusi merupakan manifestasi dari relasi kekuasaan dalam konteks implementasi kebijakan.

Lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga dapat dianalisis melalui dimensi context of implementation, khususnya pada aspek kapasitas institusi dan kontrol terhadap aktor. Pengawasan yang tidak optimal memberikan ruang bagi aktor seperti oknum distributor, pengecer, dan birokrat daerah untuk melakukan penyimpangan, seperti pengalihan pupuk, penimbunan, dan penjualan di luar mekanisme resmi. Pambudi (2025) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama kebocoran subsidi. Dalam perspektif Dahl, kondisi ini menunjukkan bahwa aktor dengan akses terhadap distribusi memiliki kekuasaan de facto yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah sebagai regulator. Sementara itu, dalam kerangka Dye, kegagalan negara dalam menegakkan pengawasan mencerminkan pilihan kebijakan yang tidak efektif dalam mengontrol implementasi. Dengan demikian, lemahnya pengawasan bukan sekadar masalah administratif, tetapi menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan antar aktor dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan pendataan melalui sistem RDKK juga mencerminkan interaksi antara content of policy dan context of implementation dalam kerangka Grindle. Secara normatif, RDKK dirancang sebagai instrumen kebijakan (content) untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi. Namun, dalam konteks implementasi, proses pendataan dipengaruhi oleh aktor lokal seperti kelompok tani, aparat desa, dan penyuluh pertanian yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya bias dan manipulasi data, sebagaimana ditunjukkan oleh Nugraha dan Darmanto (2025). Dalam perspektif Dahl, aktor-aktor lokal ini memiliki kekuasaan dalam menentukan akses terhadap sumber daya melalui kontrol atas informasi. Sementara itu, dalam kerangka Dye, ketidaktepatan data menunjukkan bahwa keputusan kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada realitas empiris di lapangan. Dengan demikian, kegagalan RDKK tidak hanya terletak pada desain kebijakan, tetapi juga pada konteks kekuasaan yang memengaruhi implementasinya.

Dominasi aktor tertentu dalam distribusi pupuk bersubsidi merupakan bukti nyata bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam arena kekuasaan, bukan dalam ruang yang netral. Aktor seperti distributor swasta, pengecer resmi, serta oknum birokrat daerah memiliki kepentingan ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan praktik seperti pengalihan distribusi, penimbunan, dan penjualan di luar mekanisme resmi. Dalam kerangka Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa *context of implementation* lebih dominan dibandingkan *content of policy*, sehingga tujuan kebijakan menjadi terdistorsi. Dalam perspektif Dahl, dominasi ini mencerminkan adanya aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengendalikan hasil kebijakan. Sementara itu, dalam kerangka Dye, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik pada akhirnya mencerminkan kepentingan aktor yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses



implementasi. Akibatnya, petani kecil sebagai kelompok sasaran berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengakses sumber daya secara adil.

Dengan demikian, berbagai permasalahan dalam subsidi pupuk tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi yang dipenuhi oleh relasi kekuasaan antar aktor. Ketimpangan kekuasaan inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan yang secara normatif dirancang untuk kesejahteraan petani justru mengalami distorsi dalam praktiknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan subsidi pupuk dalam implementasinya menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak semata-mata terletak pada aspek teknis distribusi, tetapi pada pola relasi kekuasaan antar aktor yang terlibat. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan, di mana aktor distribusi seperti distributor dan pengecer, serta sebagian aktor birokrasi lokal, memiliki kontrol lebih besar terhadap akses pupuk dibandingkan petani sebagai kelompok sasaran. Dominasi ini didukung oleh kekuasaan ekonomi dan jaringan distribusi yang memungkinkan mereka memengaruhi alokasi pupuk di lapangan. Di sisi lain, petani kecil berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap informasi, jaringan, dan mekanisme kontrol kebijakan. Kondisi ini menciptakan relasi yang asimetris, di mana kebijakan yang secara normatif dirancang untuk kepentingan petani justru dalam praktiknya lebih dipengaruhi oleh kepentingan aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar. Selain itu, lemahnya pengawasan negara menunjukkan bahwa aktor pemerintah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif, sehingga membuka ruang bagi terjadinya distorsi kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan subsidi pupuk mencerminkan bahwa hasil kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi oleh interaksi dan distribusi kekuasaan antar aktor dalam konteks implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan pemerataan dan keadilan bukan hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga oleh dominasi kepentingan tertentu dalam arena kebijakan. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan tidak cukup dilakukan pada aspek teknis, tetapi harus diarahkan pada penyeimbangan relasi kekuasaan, penguatan kapasitas pengawasan negara, serta peningkatan posisi tawar petani dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14-19.
- Ekawati, E., Bancin, H. D., Rizieq, R., & Asti, A. (2024). Seberapa Efektif Program Kartu Tani Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kubu Raya?. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(2), 112-124.
- Irmalasari, L., Luthfi, M., & Baharuddin, B. (2024). Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 137-150
- Jamil, A. (2023). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 161–172.
- Khaq, M. Z., & Biswan, A. T. (2025). Optimalisasi Subsidi Pupuk: Mengatasi Inefisiensi Biaya Subsidi dan Mekanisme Distribusinya. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1), 103–115.
- Najah, U. A. S., & Lubis, L. (2025). Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*.
- Nugraha, R. A., & Darmanto, E. (2025). Pengembangan Sistem Alat Bantu Entry Data Hasil Tani Bagi Petani Untuk Mendukung Kinerja BPS Kabupaten Pati Berbasis WEB. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1953-1961.



- Pambudi, A. S. (2025). Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk untuk Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1799-1818.
- Purwanto, A. (2026). Negosiasi Kepentingan dalam Proses Kebijakan Publik: Analisis Kualitatif Perspektif Aktor Kebijakan. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 9-13.
- Putri, M. A., & Kumbara, K. (2024). Dinamika Subsidi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif dari Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Triton*, 15(2), 510-525.
- Rahmaan, A. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Perspektif Anggaran dan Distribusi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ragimun, R., Makmun, M., & Setiawan, S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1).
- Rahayu, T., Tobing, R. D., Sinaga, O. S., Zai, B., Tan, N., & Surbakti, N. V. (2025). Politik Subsidi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Sistematis atas Kebijakan Ekonomi Populis di Negara Berkembang. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 1324-1337.
- Rahmaan, B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).
- Rozci, F., & Rizkiyah, N. (2024). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi dan Peningkatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 12(1), 12–21.
- Saifullah, A. M. M., SH, M., & MM, M. (2022) *Buku Referensi Kebijakan Publik Dari Konsep Hingga Aksi*. Penerbit Adab.
- Setiyana, Y., & Alwi, A. (2024). De-Coupling Games: Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Luwu Utara. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 227-238.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarissa, M. (2026). *Pengaruh Pupuk Bersubsidi, Harga Pupuk, Dan Produktivitas Padi Terhadap Pendapatan Petani Di Sumbagsel Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2024 (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.